

DARI NUSANTARA KE INDONESIA: SEJARAH KOLONIALISME DAN KEBANGKITAN NASIONALISME

AMANAN

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Email: amanan@unilak.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengulas pengaruh kolonialisme Eropa terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia melalui pendekatan metodologi sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur yang mendalam, mengacu pada buku, artikel jurnal, dan berita yang relevan untuk menganalisis kedatangan Portugis dan Belanda serta dampaknya terhadap perdagangan rempah-rempah dan kehidupan sosial masyarakat pribumi. Artikel ini mengungkap bagaimana kolonialisme menjadi pemicu utama dalam munculnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana sejarah kolonial membentuk kesadaran kuat bagi perjalanan menuju identitas nasional yang inklusif dan determinan dalam konteks global modern.

A. Pendahuluan

Sejarah Nusantara, yang kini dikenal sebagai Indonesia, merupakan kisah panjang perjalanan sebuah bangsa yang terbentuk dari beragam suku, budaya, dan latar belakang etnis yang tersebar di kepulauan yang luas. Masa lalu Indonesia yang dipenuhi dengan kekayaan rempah-rempah dan keberagaman budaya menjadi fondasi yang kuat bagi identitas nasional yang kita kenal hari ini. Namun, untuk memahami sepenuhnya bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu, tidak bisa dilepaskan dari jejak kolonialisme yang telah memberikan dampak mendalam pada perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di tanah air.

Kedatangan bangsa Eropa, seperti Portugis dan Belanda, tidak hanya membawa dampak ekonomis melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi juga meninggalkan warisan yang kompleks dalam bentuk intervensi politik dan sosial. Pada saat yang sama, kolonialisme membangun jaringan infrastruktur, sistem administrasi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan lain-lain yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan perkembangan masyarakat lokal. Hasil dari interaksi ini tidak hanya menciptakan ketegangan dan perlawanan, tetapi juga memicu lahirnya kesadaran nasionalisme di kalangan intelektual dan pemimpin muda.

Seiring dengan perubahan zaman, Indonesia modern menghadapi tantangan baru dalam membangun identitas nasional yang inklusif di tengah dinamika global dan lokal yang kompleks. Perkembangan teknologi dan konektivitas global membawa tantangan baru dalam mempertahankan keberagaman budaya dan menerjemahkan nilai-nilai nasionalisme ke dalam konteks yang relevan. Oleh karena itu, memahami bagaimana sejarah kolonialisme membentuk landasan bagi perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dan kesatuan menjadi penting dalam merumuskan visi masa depan yang berkelanjutan dan berintegrasi.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana masa lalu kolonialisme mengilhami semangat perlawanan dan kesatuan di Indonesia, serta relevansinya dengan tantangan zaman sekarang. Dengan menganalisis perjalanan sejarah ini secara kritis dan humanis, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana identitas nasional terbentuk dan berkembang, serta bagaimana kita dapat memanfaatkan warisan sejarah ini untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

B. Pembahasan

Bangsa kita yang dikenal dengan nama Indonesia saat ini, dahulu bernama Nusantara. Pada masa itu, Nusantara terkenal di Eropa sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan, terutama untuk menghangatkan tubuh selama musim dingin. Bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Nusantara adalah bangsa Portugis, diikuti oleh bangsa Belanda.

Bangsa Portugis tiba di Kerajaan Malaka pada tahun 1509 dengan niat untuk menjalin hubungan persahabatan. Namun, hubungan ini tidak bertahan lama karena ketidakmampuan Portugis menjaga keharmonisan tersebut, yang akhirnya menimbulkan kemarahan raja Malaka. Peristiwa ini memicu konflik antara Portugis dan Datuk Bendahara Malaka. Utusan Portugis berhasil melarikan diri ke Goa di India, tempat kediaman wakil raja Portugis. Di sana, utusan tersebut membalikkan fakta dengan menyatakan bahwa raja Malaka menolak bersahabat dengan Portugis. Akibatnya, pada tahun 1511, pasukan Portugis menguasai Malaka, mengganggu jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya diakses oleh bangsa India, Cina, Arab, dan lainnya (Iqbal et al., 2023).

Kekuasaan Portugis di Malaka berakhir dengan kedatangan Belanda pada tahun 1595-1596. Tidak seperti Portugis, Belanda datang sebagai kongsi-kongsi dagang swasta yang kemudian disatukan dalam sebuah organisasi yang bernama VOC oleh pemerintah Belanda untuk mengatasi persaingan antar kongsi-kongsi dagang. Pembentukan VOC membawa keuntungan besar bagi Belanda karena rempah-rempah yang dibeli murah di Nusantara dan dijual dengan harga tinggi di Eropa (Amal, 2010).

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) didirikan pada awal abad ke-17 sebagai kongsi dagang Belanda untuk mengontrol perdagangan di Hindia Belanda. Namun, seiring waktu, VOC menghadapi berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan pembubarannya pada tahun 1799 (Abdullah & Sedyawati, 1997). Alasan utama pembubaran VOC termasuk korupsi yang merajalela di dalam organisasi, inefisiensi manajemen, serta beban hutang yang menumpuk akibat biaya perang yang tinggi dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain itu, persaingan dengan perusahaan dagang lainnya dan meningkatnya ketidakpuasan di antara para pemegang saham juga mempercepat kehancuran VOC. Pemerintah Belanda kemudian mengambil alih wilayah dan aset VOC, menjadikan Hindia Belanda sebagai koloni yang dikelola langsung oleh negara (Basri et al., 2014).

Setelah pengambilalihan tersebut, pemerintah kolonial Belanda mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan dari wilayah Nusantara. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan *cultuurstelsel*. Sistem ini mewajibkan petani pribumi untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi, tebu, nila, karet, dan tembakau di sebagian tanah mereka, sementara sisanya tetap digunakan untuk kebutuhan pangan lokal. Daerah-daerah yang paling terdampak oleh sistem ini adalah Jawa, Sumatra, dan beberapa wilayah di Sulawesi dan Maluku. Tujuan utama tanam paksa adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial Belanda (Kartodirdjo, 1992).

Namun, kebijakan tanam paksa ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi penduduk pribumi. Lahan yang biasanya digunakan untuk menanam padi berkurang drastis, menyebabkan kekurangan pangan yang parah. Beban kerja yang berat tanpa kompensasi yang memadai menyebabkan banyak petani mengalami kelelahan dan penyakit. Kelaparan menjadi hal yang umum di daerah-daerah yang terlibat dalam tanam paksa, dengan ribuan orang meninggal akibat kekurangan gizi dan penyakit yang menyertainya. Kondisi kesehatan masyarakat merosot tajam, menciptakan krisis kemanusiaan yang memprihatinkan. Hal ini juga terkait dengan situasi di berbagai daerah pada masa itu. Pada tahun 1911, daerah Hindia Belanda terkena wabah pes. Pada awal abad ke-20 itu banyak juga yang terjangkit malaria, cacar, campak dan tingginya angka kematian (M.C. Ricklefs, 1981).

Melihat penderitaan yang diakibatkan oleh tanam paksa, beberapa pejabat Belanda mulai menyadari perlunya perubahan dalam kebijakan kolonial. Hal ini mendorong lahirnya politik etis pada awal abad ke-20, yang dipelopori oleh para reformis Belanda. Politik etis adalah upaya pemerintah kolonial untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat pribumi melalui tiga program utama: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Salah satu langkah penting dalam politik etis adalah pendirian sekolah-sekolah dan institusi pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat pribumi (Poesponegoro & Notosusanto, 1992).

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk sekolah medis untuk mengatasi penyakit seperti malaria, cacar, dan campak. Dampak positif dari politik etis ini adalah munculnya golongan terdidik di kalangan masyarakat pribumi. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak hanya meningkatkan kemampuan intelektual tetapi juga membangkitkan kesadaran nasional di kalangan siswa. Salah satu bidang pendidikan yang sangat ditekankan adalah keperawatan dan kedokteran, mengingat kondisi kesehatan masyarakat Hindia Belanda yang sangat memprihatinkan akibat kebijakan tanam paksa. Tanam paksa tidak hanya mengakibatkan kelaparan, tetapi juga menyebarkan berbagai penyakit seperti malaria, kolera, dan disentri, yang diperparah oleh buruknya sanitasi dan akses kesehatan yang minim (Boomgard, 2014).

Dalam konteks inilah pendirian sekolah kedokteran seperti STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) menjadi sangat penting. STOVIA, yang didirikan pada tahun 1902, bertujuan untuk melatih dokter-dokter pribumi yang dapat menangani masalah kesehatan di masyarakatnya sendiri. Para siswa yang diterima di STOVIA tidak hanya menerima pendidikan medis yang setara dengan standar Eropa, tetapi juga diajarkan untuk memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat mereka. Hal ini membuat para lulusan STOVIA tidak hanya menjadi dokter yang kompeten, tetapi juga pemimpin yang peka terhadap penderitaan rakyatnya (M.C. Ricklefs, 1981).

Banyak dari para lulusan sekolah kedokteran ini kemudian menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Mereka menyadari bahwa untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, diperlukan perubahan sosial dan politik yang lebih luas. Mereka melihat bahwa kesehatan dan pendidikan adalah dua pilar utama untuk membangun masyarakat yang kuat dan mandiri. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dan pendidikan juga menyebar ke berbagai lapisan masyarakat melalui pengaruh para lulusan ini.

Semasa pelaksanaan politik etis ini, dibangun pula mulai dari sekolah rakyat, sekolah MULO, sekolah Holland Inlandsch-School, Horgere Burgere School (HBS), dan kemudian bersekolah ke perguruan tinggi. Upaya ini melahirkan golongan terpelajar yang kemudian menyadari penderitaan rakyat akibat kolonialisme dan mulai membentuk organisasi pergerakan nasional. Pada 20 Mei 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo di Jakarta dengan 40 cabang dan sekitar 10.000 anggota. Serikat Sumatera didirikan pada tahun 1918 oleh orang-orang Sumatera di Jakarta, tidak hanya berfokus pada kebudayaan tetapi juga politik, untuk memperluas hak-hak dan otonomi daerah (Pringgogidjo, 1994).

Kesadaran akan pentingnya nasionalisme semakin menguat. Hal ini ditandai dengan Kongres Pemuda pertama pada 30 April - 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua pada 27-28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh berbagai pemuda yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, seperti *Jong Java*, *Jong Sumatra*, *Jong Betawi*, *Jong Batak*, *Jong Celebes*, dan lain-lain. Kongres kedua ini menghasilkan Sumpah Pemuda (Poesponegoro & Notosusanto, 1992). Berikut isi teks Sumpah Pemuda tersebut:

"Pertama, kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertumpah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedua, kami poetra-poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga, kami poetra-poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia." (Ikram et al., 2009)

Keberhasilan mencapai kesepakatan mengenai bahasa persatuan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesadaran nasionalisme di Indonesia. Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah tetap mempertahankan bahasa daerahnya namun menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia akan diakui sebagai salah satu bahasa di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2040. Kesadaran nasionalisme ini, baik di kalangan warga asli maupun naturalisasi, berperan besar dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Kedatangan kolonialisme, meskipun membawa penderitaan dan eksploitasi, secara tidak langsung memacu semangat nasionalisme yang ada di Indonesia. Pada masa ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang tersebar dan tidak ada persatuan yang

kuat, intervensi kolonial menyoroiti perlunya kesatuan untuk melawan penindasan. Kolonialisme menyadarkan rakyat Nusantara bahwa kekuatan dan ketahanan bangsa hanya bisa dicapai melalui persatuan. Dampak dari penjajahan Portugis dan Belanda, terutama melalui kebijakan tanam paksa dan monopoli perdagangan, menumbuhkan kesadaran di kalangan golongan terpelajar tentang pentingnya solidaritas nasional.

Organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo dan Kongres Pemuda, lahir dari kesadaran ini dan berhasil menanamkan semangat kebangsaan yang menghubungkan berbagai suku dan budaya di Nusantara. Semangat nasionalisme inilah yang kemudian memuncak dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, menjadikan Indonesia sebuah bangsa yang merdeka dan bersatu. Dari pengalaman pahit kolonialisme, Indonesia belajar untuk memperkuat identitas nasional dan berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa dari kesulitan dan penindasan, lahirlah kesadaran dan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian. Dengan demikian, politik etis, meskipun dimotivasi oleh keprihatinan kolonial, secara tidak langsung menjadi katalisator bagi lahirnya semangat nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia.

C. Penutup

Dalam mengkaji perjalanan sejarah Nusantara menuju Indonesia, kita tidak dapat mengabaikan peran sentral kolonialisme dalam membentuk identitas nasional yang kuat. Penjajahan Eropa bukan hanya mewariskan warisan material berupa sistem perdagangan dan infrastruktur, tetapi juga memberikan semangat kesadaran akan persatuan dan perlawanan terhadap penindasan. Setiap fase kolonialisme, dari kedatangan pertama bangsa Portugis hingga kebijakan tanam paksa Belanda, telah menjadi ujian yang menggalang semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ini adalah cerita tentang bagaimana dari kekacauan dan penderitaan, lahirnya sebuah bangsa yang bersatu dalam keberagaman, terbentuk atas dasar perjuangan yang mengilhami generasi-generasi berikutnya.

Dalam konteks zaman sekarang, warisan sejarah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan kesatuan dan keberagaman dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Masa lalu kolonialisme tidak hanya menjadi catatan hitam, tetapi juga pendorong untuk terus membangun kemandirian dan keadilan sosial. Dengan memahami dan menghargai perjalanan panjang ini, Indonesia dapat melangkah maju dengan keyakinan yang kuat untuk menjaga identitas nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta membangun masa depan yang adil dan makmur bagi semua warga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T., & Sedyawati, E. (Eds.). (1997). *Sejarah Indonesia (Penilaian Kembali Karya Utama Karyawan Asing)*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia & Sayla Grafika.
- Amal, M. A. (2010). *Kepulauan Rempah-Rempah (Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950)*. Kepustakaan Populer Gramedia .
- Basri, M., Ayu, S. N., Nabilla, G., & Berutu, S. L. (2014). Background to the Arrival of the Dutch, VOC, Dutch East Indies. *EDUCTUM: Journal Research*, 3(1), 21–26.
- Boomgard, P. (2014). *Perkembangan Pelayanan dan Sarana Kesehatan di Jawa Abad ke-20*.
- Ikram, A., Kridalaksana, H., Lauder, M., MPPS, P., Rahman, N., Kramadibrata, D., Wibisono, S., Supartha, I. M., Yoesoef, M., Holil, M., & Arybowo, S. (2009). *Sejarah Kebudayaan Indonesia (Bahasa, Sastra, dan Aksara)*. Rajawali Press.
- Iqbal, M., Izzatusshobikhah, N., & Nuvitaning Sari, I. A. (2023). PERSEKUTUAN KERAJAAN ACEH DARUSSALAM DENGAN TURKI UTSMANI DALAM MENGHADAPI KOLONIALISME PORTUGIS DI NUSANTARA 1537-1571 M. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 2(1), 51–73. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i1.1081>
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium*. Gramedia Pustaka Utama.

- M.C.Ricklefs. (1981). *Sejarah Indonesia Modern*. Gadjah Mada University Press.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A. K. (1994). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta.